

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dunia internasional sekarang ini tidak hanya berfokus pada isu-isu konflik seperti perang saja, tetapi juga isu hak asasi, seperti kesetaraan gender. Dalam era globalisasi, isu terkait kesetaraan gender merupakan salah satu isu internasional yang masih terus berkembang dan perlu perhatian khusus. Hal ini didukung oleh masih melekatnya budaya patriarki dalam mayoritas struktur sosial masyarakat berbagai negara di dunia. Nilai-nilai patriarki yang masih menekankan pada dominasi peran laki-laki baik dalam ranah privat maupun politik. Hal ini telah mengakibatkan terhambatnya kebebasan perempuan untuk mengembangkan potensinya secara utuh. Nilai-nilai tersebut seringkali muncul sebagai persoalan penindasan terhadap perempuan, seperti dalam pendidikan, politik, sosial, lapangan kerja, seni, maupun dalam hal seksualitas. Pada akhirnya, perempuan sebagai entitas hanya memiliki sedikit ruang di dalam masyarakat.

Jenis kelamin terbagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan perbedaannya sudah tentu terlihat dari biologisnya, yaitu jenis kelamin dari masing-masing gender, sementara perempuan memiliki vagina. Sementara makna dari Gender sendiri berbeda dengan seks. Gender dapat dimaknai sebagai perbedaan pembagian peran serta tanggung jawab antara perempuan dan laki-

laki dimana adanya perbedaan perilaku serta sosial antara perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh komunitas masyarakat yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Dari penjelasan tersebut seks dan gender merupakan hal yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan dengan pemberian Tuhan. Pada dasarnya, apa yang didapat oleh laki-laki, dapat juga dimiliki perempuan didalam gender, begitupula sebaliknya. Misalnya berkenaan dengan sifat seperti perempuan yang cenderung memiliki sifat kuat dan keras akibat adanya penilaian dari konstruksi social. Padahal kenyataannya perempuan pun dapat memiliki sifat tersebut.

Adapula dari sifat profesi dimana misalnya profesi *body builder* tentu akan cenderung berfikir pada mayoritas laki-laki yang lebih efisien untuk pekerjaan tersebut, namun sekarang ada juga perempuan yang memiliki profesi *body builder*. Tidak hanya itu, terkait posisi laki-laki selalu berada ditingkatan diatas dibanding perempuan, padahal pada kenyataannya perempuan juga dapat memimpin seperti pada masa kepemimpinan Presiden Megawati. Namun demikian, kebudayaan yang dimotori oleh budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Akhirnya tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat

bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Ada sebagian masyarakat yang sangat kaku membatasi peran yang pantas dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, misalnya tabu bagi seorang laki-laki masuk ke dapur atau menggendong anaknya di depan umum dan tabu bagi seorang perempuan untuk sering keluar rumah untuk bekerja. Namun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang fleksibel dalam memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya perempuan diperbolehkan bekerja sebagai kuli bangunan sampai naik ke atap rumah atau memanjat pohon kelapa, sedangkan laki-laki sebagian besar menyabung ayam untuk berjudi.

Hal yang turut memperkuat adanya ketidaksetaraan gender adalah angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin besar, dan ditemui di segala pelosok dunia. Perempuan juga dibatasi pergerakannya, di beberapa negara, masih banyak perempuan yang haknya masih dibatasi, bahkan seakan seperti dibelenggu, perempuan tidak dapat bebas untuk memilih pekerjaan, serta memiliki karir seperti lelaki.

Sebuah studi internasional tahun 2011 lalu yang diadakan oleh *Thompson-Reuters Foundation*, India menjadi negara nomor empat paling berbahaya bagi wanita. Studi ini melibatkan 213 ahli dari berbagai negara. Dalam studi ini, para ahli tersebut menyusun peringkat negara-negara berdasar enam kategori, yaitu ancaman kesehatan, kekerasan seksual, kekerasan non-seksual, praktik-praktik berbahaya dalam budaya, tradisi dan/atau agama, keterbatasan akses terhadap

sumber ekonomi dan perdagangan manusia. Tingginya pembunuhan bayi perempuan dalam kandungan, dan perdagangan manusia di India telah menempatkan India sebagai negara paling berbahaya bagi wanita (BBC 2011).

Berbagai kasus diskriminasi India yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Segala bentuk kekerasan seperti fisik, seksual, maupun mental akan menjadi batas penelitian ini Kekerasan merupakan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga di negara India. Sebagian besar korban KDRT di India cenderung takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Ketakutan untuk melaporkan kasus KDRT yang terjadi di India dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat.

Masih banyak Negara-Negara yang menjadi tempat mimpi buruk untuk kaum perempuan dikarenakan ketidaksetaraan gender didalamnya. Pada Negara Sri Lanka misalnya Kebebasan perempuan di negara berkembang seperti Sri Lanka masih menjadi masalah klasik yang belum terselesaikan hingga hari ini. Masalah sosial budaya yang masih kuat melekat di masyarakat menjadi faktor utama ketidakbebasan perempuan dalam menggunakan dan menentukan hak kebebasannya. Teutama terkait hak perempuan dalam partisipasi politik Di Sri Lanka tidak ada Undang-Undang yang mengatur mengenai jumlah persentase kouta politik bagi kaum perempuan sehingga hal itu menghambat peran politik mereka. Usulan kouta sebesar 25% hanya dianggap sebatas wacana dan tidak

pernah terealisasi bagaimanapun sulitnya perempuan dalam menghadapi diskriminasi gender.

Struktur budaya dan adat istiadat yang tertanam selama ini menunjukkan dominasi kaum laki-laki untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan pemerintahan, apalagi di bidang politik. Oleh karenanya kaum perempuan Sri Lanka merasa bahwa politik bukanlah bidang mereka, walaupun mereka mempunyai potensi untuk itu, akan tetapi mereka merasakan tidak mempunyai kapabilitas. Mereka juga tidak mendapat dukungan dari keluarga maupun dari lingkungannya untuk berkarir di tingkat politik, sehingga sebagian besar memutuskan untuk bekerja kasar atau menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri.

Penyalahgunaan kepada Agama dan Tradisi juga merupakan salah satu dorongan besar pada ketidaksetaraan gender di dunia, banyak hal yang disalahgunakan Agama dalam menekan perempuan untuk bergerak bebas, seperti dalam penafsiran tentang teks keagamaan yang akhirnya membuat bias peran gender yang terjadi dimasyarakat. Serta faktor budaya patriarki yang terus menerus diproduksi, membuat apa yang sebenarnya salah menjadi hal yang wajar bagi perempuan dalam menerima peran mereka di bawah tekanan patriarki.

Kondisi tersebut sering menyebabkan penyalahan kepada Agama dan Tradisi yang dianggap lebih memihak laki-laki dan bersifat misoginis (membenci perempuan). Inilah yang, menurut mereka, menjadi penyebab maraknya

kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam rumah tangga. Mereka bahkan menuduh norma agama khususnya Islam turut mendukung langgengnya budaya kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT.

Dikarenakan banyaknya kasus-kasus ketidaksetaraan gender di dunia, maka pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan dari Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya akan disebut CEDAW (Sri 2005). Konvensi ini adalah sebuah traktat hak asasi manusia yang menegaskan hak reproduktif bagi perempuan dan sasaran-sasaran budaya dan tradisi sebagai usaha yang berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Konvensi ini menegaskan bahwa dengan hak asasinya, perempuan berhak untuk mendapatkan, mengubah, atau menaruh kewarganegaraan mereka dan kewarganegaraan anak-anak mereka. Negara pihak juga sepakat untuk mengambil semua tindakan yang layak terhadap segala bentuk kesulitan yang dialami perempuan dan eksploitasi terhadap perempuan (UN Women 2009).

Negara tidak boleh mengesampingkan isu Kesetaraan Gender dikarenakan kekerasan dan diskriminasi pada perempuan karena kesetaraan gender tidak hanya penting pada sisi moralitas, keadilan tapi juga penting untuk sisi ekonomi (Sri Mulyani. 2019). apabila suatu negara tidak menciptakan lingkungan yang setara seperti kesetaraan gender maka 12 triliun USD kue ekonomi akan hilang

atau kira-kira 16,5% dari total ekonomi global setara 8 kali ekonomi salah satu contoh besar adalah di Indonesia, yang dapat menciptakan lingkungan politik, serta ekonomi yang lebih kuat jika perempuan juga turut ambil alih didalamnya (Mckinsey. 2019)

Indonesia memiliki jumlah populasi perempuan yang tinggi, namun untuk perempuan kesempatan kerja bagi mereka masih sangat minim. Keterlibatan perempuan dalam sektor-sektor publik masih kurang dikarenakan pola pikir bahwa yang boleh mendominasi sektor tersebut adalah laki-laki. Apabila perempuan menempati posisi dalam sektor tersebut, maka cenderung perempuan berada dibawah laki-laki. Hal ini dikarenakan dianggap kemampuan perempuan masih dibawah laki-laki. Dan hal tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan hak yang seharusnya diperoleh kaum perempuan dan masih membuktikan minimnya tingkat kesetaraan gender di Indonesia.

Kondisi inilah yang mendukung munculnya berbagai gerakan perjuangan hak-hak perempuan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai belahan dunia. Gerakan feminisme ini dilakukan oleh kelompok yang pada dasarnya mengusung ide bahwa kaum perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Gerakan ini juga berusaha untuk mengubah pandangan terkait karakteristik perempuan yang dianggap lemah, tidak kompeten, dan tidak bisa mandiri, dan meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang.

Gerakan Feminisme merupakan gerakan sosial yang dimotori oleh aktor-aktor pelopor Feminisme dengan tujuan mendobrak nilai-nilai Patriarki, penghapusan gerakan Patriarki itulah yang mendorong para feminis untuk bergerak menciptakan aktivitas-aktivitas feminisme yang bertujuan untuk menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender di dunia khususnya di Negara Berkembang

*UN Women* atau Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, adalah entitas PBB yang bekerja untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan. *UN Women* dibentuk pada Juli 2010 dan mulai dioperasionalkan sejak Januari 2011.

*UN Women* merupakan prestasi global bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Karena pembentukan *UN Women* merupakan penggabungan dari mandate dan fungsi dari empat badan PBB terdahulunya yang sama-sama bertujuan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu tujuan terbentuknya *UN Women* ini mengandung keseluruhan tujuan dari empat badan PBB tersebut.

Dalam ranah Internasional *UN Women* sendiri, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan adalah suatu masalah yang harus diperhatikan oleh dunia Internasional. Sehubungan dengan itu *UN Women* pun memulai kampanye *HeForShe*, yaitu kampanye-kampanye mengenai kesetaraan gender.

Kampanye *Heforshe* resmi didirikan pada 20 September 2014 di kota New York, Amerika Serikat. Ban Ki Mon sebagai Sekeretaris Jenderal PBB secara langsung menunjuk Emma Charlotte Watson sebagai duta besar dari kampanye ini. Peresmian kampanye ini diakhiri dengan pidato Emma Watson yang menyampaikan bahwa kampanye *Heforshe* secara langsung mengajak laki-laki untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesetaraan gender di dunia.

Ketidakadilan gender di Indonesia tidak terlalu terlihat namun faktanya masih banyak hal-hal dalam publik yang secara tidak langsung berhubungan dengan kesenjangan gender. Indonesia sendiri pun masih menerapkan budaya patriarki dimana posisi atau derajat yang dimiliki laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan sikap kekuasaan dan posisi otoriter bagi laki-laki dikarenakan memiliki keunggulan dibanding perempuan, yang pada akhirnya menimbulkan diskriminasi pada perempuan.

Kekerasan Rumah Tangga merupakan kasus yang paling sering terjadi terutama di Indonesia, Menurut Undang-undang RI no. 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu

bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat.

Mengambil dari catatan tahunan Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap perempuan tahun 2016 masalah KOMNAS Perempuan. Komnas Perempuan membagi persoalan kekerasan terhadap perempuan menjadi 3 wilayah yaitu : Kekerasan Personal (KDRT), Ranah Komunitas dan Ranah Negara.

**Ranah Personal:** Berdasarkan jumlah kasus sebesar 321.752 tersebut, maka sama seperti tahun sebelumnya, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sementara bentuk kekerasan yang terbesar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dibandingkan tahun sebelumnya. Bila tahun lalu kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, tahun ini naik di peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Beberapa kasus yang direkam oleh Komnas Perempuan adalah terjadi kekerasan terhadap perempuan (pekerja rumah tangga dan istri) yang diduga dilakukan oleh pejabat publik dari anggota parlemen, serta kejahatan perkawinan yang dilakukan artis.

**Ranah Komunitas:** Sebanyak 31% (5.002 kasus), dan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%), sama seperti tahun sebelumnya (data 2014 dan data 2013). Untuk tahun ini jenis dari bentuk kekerasan ini adalah perkosaan (1.657 kasus), pencabulan (1.064 kasus), pelecehan seksual (268 kasus), kekerasan seksual lain (130 kasus), melarikan anak perempuan (49 kasus), dan percobaan perkosaan (6 kasus). Di luar persoalan perkawinan dan rumah tangga Komnas Perempuan memberi perhatian serius tentang meluasnya tema kekerasan seksual yang muncul dalam pemberitaan media, yaitu: pekerja seks online, mucikari, artis pekerja seks, kasus cyber crime, iklan biro jodoh berkedok syariah dan penyedia jasa pelayanan perkawinan siri, kasus perbudakan seks seorang anak perempuan oleh ayah mertua di Tapanuli Selatan.

**Ranah Negara:** Di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara, artinya aparat negara sebagai pelaku langsung atau melakukan pembiaran pada saat peristiwa pelanggaran HAM Perempuan terjadi. Ditemukan adanya 8 kasus, diantaranya 2 kasus pemalsuan akta nikah dilaporkan terjadi di Jawa Barat, kemudian 6 kasus lainnya dilaporkan terjadi di NTT, seperti kasus trafficking yang menemui hambatan di kepolisian dan kasus penganiayaan oleh oknum polisi. Komnas Perempuan juga mencatat pembiaran pada kasus peristiwa pelanggaran HAM Masa Lalu yang berdampak pada perempuan korban. Pada kasus pelanggaran

HAM Masa Lalu, terdapat kasus kekerasan seksual, dan stigmatisasi terhadap perempuan (KOMNAS Perempuan. 2016).

Ketidaksetaraan gender paling besar juga terjadi pada provinsi-provinsi tertentu di Indonesia, terutama provinsi pedalaman yang masih sulit terjangkau. Provinsi-provinsi ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk UN Women dalam menjangkau Kesetaraan Gender di Indonesia. Pernikahan dini, pemerkosaan, keterbatasan perempuan dalam memilih hak, dan menggunakan perempuan sebagai objek untuk menaikkan nama baik keluarga.

Feminisme bersumber dari Bahasa Latin *femina* yang berarti emansipasi perempuan. Istilah ini pertama kali digunakan dalam debat politik di Perancis pada akhir abad 19 ( Hannam, 2013). Gerakan feminisme merupakan gerakan politik yang meninjau aspek ketidakadilan yang sudah lama diderita oleh kaum perempuan. Hal ini diperjuangkan oleh kaum perempuan dan melahirkan feminisme ke dalam tiga gelombang. Pada feminisme pertama dimulai pada tahun 1792-1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis pada abad 18 bernama Mary Wollstonecraft. Dalam karya nya yang berjudul *A Vindication of the Rights of Women*, Mary Wollstonecraft menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga ke abad-20 dimana perempuan berhasil mencapai hak pilihnya. Sedangkan feminisme gelombang kedua lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan. Gerakan ini adalah gerakan revolusioner yang muncul tahun 1960-1980. Selanjutnya gerakan ketiga dimulai tahun 1980 sampai

sekarang. Gerakan ini disebut sebagai posfeminisme dan banyak dijadikan rujukan feminisme modern.

Adapula yang disebut sebagai Feminisme Radikal. Feminisme radikal muncul pada tahun 1960-1980 dan berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik ia seorang heteroseksual, lesbian, maupun transgender. Aliran feminisme ini percaya bahwa identitas gender feminin membatasi perempuan untuk berkembang sebagai manusia seutuhnya, dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Feminisme radikal juga banyak di kalangan perempuan terutama di negara-negara maju yang menganut Liberalisme, tapi tidak dipungkiri di Indonesia juga masih ada masyarakat yang menganut Feminisme radikal dimana perempuan cenderung membenci laki-laki dan berusaha menurunkan derajat laki-laki secara ekstrem, hal ini yang membuat masyarakat memandang sebelah mata pada feminisme dan kesetaraan gender di Indonesia dan tantangan yang sulit bagi UN Women untuk memberikan pengetahuan feminisme di Indonesia.

Dalam masalah diatas *UN Women* bermitra dengan Pemerintah Indonesia untuk mendukung kampanye *Heforshe*, dengan mendukung kampanye dan melaksanakannya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2015 Tentang kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan pemenuhan Hak Anak. Dan upaya yang dilakukan yaitu melalui Strategi Pangarusutamaan Gender (PUG), *Program Safe City*, memasukan

kesetaraan berbasis gender dalam perencanaan pembangunan nasional, menyelenggarakan pelayanan terhadap korban KDRT, dan mengubah pola pikir laki-laki dan melibatkan mereka dalam kampanye *heforshe*.

Kampanye *heforshe* menjadi salah satu upaya yang dilakukan *UN Women* dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan ketidak setaraan gender di Indonesia, dimana Heforshe menggandeng laki-laki agar turut dapat memberikan dukungan akan aksi gerakan kesetaraan gender tersebut. Di Indonesia, gerakan tersebut sedang dalam proses dimana Presiden Indonesia Jokowi turut mendukung kampanye tersebut, beliau menjadi duta gerakan *Heforshe* dan memberikan dukungan penuh agar gerakan Heforshe dapat disebarkan dan terealisasikan. Gerakan kampanye *Heforshe* merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh *UN Women* dengan tujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender, serta guna meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai isu kesetaraan gender yang telah merugikan banyak perempuan.

Salah satu kegiatan dari kampanye ini adalah dengan mengadakan *Heforshe Run* yang sering diadakan dari tahun ke tahun guna mendorong masyarakat untuk turut serta ikut dalam kesejahteraan gender di Indonesia. *HeForShe Run* bertujuan memberikan semangat kesetaraan karena Lari dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada batasan gender, usia, keyakinan, atau status social dan ekonomi, biasanya kegiatan ini dilakukan bertepatan pada tanggal hari perempuan sedunia. Lalu ada pula kegiatan *Heforshe Arts Week* yang juga diadakan pada tanggal

memperingati hari perempuan sedunia, *HeForShe Arts Week* adalah inisiatif yang menargetkan komunitas seni untuk mendukung kesetaraan gender selama satu minggu penuh dimulai dari Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret setiap tahun. Pada tahun 2016, *HeForShe Arts Week* berhasil melibatkan lebih dari tiga puluh institusi seni untuk menyumbangkan berbagai penampilan seni, seperti festival film, pertunjukkan Broadway, dan galeri seni, untuk menggaungkan kesetaraan gender.

Gerakan ini juga mendapatkan banyak dukungan dari komunitas maupun perusahaan sehingga gerakan ini menjalin kerjasama atau biasa disebut mitra dengan perusahaan lain guna memperkuat misi untuk kesetaraan gender di Indonesia. Salah satu perusahaan yang bekerjasama dengan *UN Women* dan *Heforshe* adalah PT. Unilever, perusahaan ini sudah dikenal sebagai perusahaan ramah perempuan semenjak bekerjasama dengan *UN Women*. Sebagai salah satu bukti, pada akhir 2019, 44,1% dari jajaran direktur Unilever Indonesia terdiri dari karyawan perempuan dan 40,7% dari jajaran manager juga ditempati oleh karyawan perempuan. PT. Unilever juga memiliki program *Women in Engineering Leadership Fellowship* (WULF) untuk mendukung perempuan Indonesia berkarir di bidang teknik, yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki.

Pada penelitian diatas penulis bermaksud mencari lebih dalam apa pengaruh yang sudah diberikan *UN Women* dalam kampanye *heforshe* di Indonesia setelah melihat beberapa kasus ketidaksetaraan gender yang ada di Indonesia. Penelitian

ini sudah pernah diangkat oleh mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Haifa Hafianty Susetyo yang berjudul Kampanye Heforshe 2015-2016 yang Diprakarsai oleh *UN Women* Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia. Namun, perbedaan antara penelitian beliau dengan penulis adalah, penulis meneliti kampanye *heforshe* dari tahun 2016-2019, penulis memilih tahun 2016 karena kasus kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2016 cukup memprihatinkan dimana banyak sekali kasus KDRT, kasus pemerkosaan, dan diskriminasi perempuan dalam dunia sosial maupun dunia pekerjaan. Penulis juga membatasi pada tahun 2019 karena tahun 2019 adalah tahun perubahan pada kesetaraan gender di Indonesia seperti perusahaan-perusahaan yang ramah perempuan, kebijakan-kebijakan serta undang-undang yang lebih berpihak pada perempuan sehingga akan terlihat perbedaan antara 2016 hingga 2019 berkat kampanye ini.

Penulis juga sudah mendapatkan beberapa sumber dan data serta pengetahuan umum dari mata kuliah yang sudah peneliti ambil di prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia yakni, mata kuliah Organisasi Internasional, dimana penulis mendapat pengetahuan mengenai teori peran Organisasi Internasional, Hukum Internasional dimana peneliti mendapat banyak sumber mengenai hukum-hukum serta konvensi yang digunakan dalam penelitian ini, dan penulis juga mendapat sumber dari mata kuliah yang berkaitan yaitu Gender dalam Hubungan Internasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan mayor peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut **“Bagaimana Peran UN Women menyelenggarakan Kampanye Heforshe dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2016-2019?”**

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

Berdasarkan Pertanyaan Mayor diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan minor sebagai berikut :

1. Apa saja program *UN Women* melalui kampanye *Heforshe* yang telah dilakukan di Indonesia untuk Kesetaraan Gender di Negara Indonesia?
2. Apa kendala *UN Women* dalam menyelenggarakan kampanye *Heforshe* di Indonesia?
3. Apa pengaruh kampanye *Heforshe* dalam mengatasi masalah kekerasan perempuan di Indonesia?
4. Apa saja yang telah dicapai *UN Women* dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam dan rinci tentang **“Bagaimana Peran UN Women menyelenggarakan Kampanye Heforshe dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2016-2019?”**

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui keseluruhan dari rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui program-program *UN Women* dalam kampanye *Heforshe* untuk Kesetaraan Gender di Indonesia
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi *UN Women* dalam melaksanakan kampanye *Heforshe*
3. Untuk mengetahui pengaruh kampanye *Heforshe* dalam mengatasi masalah kekerasan perempuan di Indonesia
4. Untuk mengetahui Apa saja yang telah dicapai *UN Women* dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Indonesia

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menunjang perkembangan dalam bidang Ilmu

Hubungan Internasional secara umum dan khususnya pada bidang Organisasi Internasional *UN Women* dan tujuannya dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia, serta bagi fakultas Ilmu Hubungan Internasional ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah, pemikiran, dan ide segar serta sarana untuk memahami Ilmu Hubungan Internasional.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan kegunaan praktis dari penelitian yang peneliti teliti, yaitu :

##### **1. Kegunaan Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan dan pengalaman baru serta menambah pengetahuan peneliti, dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya, yaitu tentang Peran *UN Women* menyelenggarakan Kampanye *Heforshe* dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2016-2019 melalui penelitian studi Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif

##### **2. Kegunaan Bagi Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia secara umumnya sebagai pengetahuan dan perolehan informasi tentang Peran *UN Women* menyelenggarakan Kampanye *Heforshe* dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2016-2019.

##### **3. Kegunaan Bagi Masyarakat Umum**

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat secara umum adalah untuk mengetahui bahwa perempuan masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat Indonesia, baik dalam bidang mental maupun fisik, dan oleh karena itu muncul Organisasi Internasional untuk mengangkat nama baik perempuan serta berjuang menyetarakan gender di dunia terutama di Negara Indonesia.